

Andreas Marbun

Email: andreas@ijrs.or.id

Linkedin: [Andreas Marbun](#)



Profil Singkat

Andreas Nathaniel Marbun (atau yang biasa disapa dengan Marbun) merupakan salah satu peneliti kebijakan hukum pidana di IJRS. Marbun menyelesaikan pendidikan program Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari University of New South Wales (UNSW) dengan spesialisasi Criminal Justice and Criminology.

Sebagai peneliti di IJRS, Marbun telah banyak menulis publikasi di bidang kebijakan hukum pidana dan peradilan pidana, termasuk untuk isu anti-korupsi, kebijakan narkoba, hingga keadilan restoratif. Disamping itu, Marbun juga telah melakukan banyak penelitian, baik studi kualitatif dan kuantitatif, terkait permasalahan hukum pidana dan kebijakan peradilan pidana di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian dan studi yang dilakukan oleh Marbun selama bekerja di IJRS tersebut (baik yang didanai secara internal maupun didanai secara eksternal) kerap kali menghasilkan beberapa publikasi dengan dampak yang luas dan secara langsung digunakan oleh pemerintah untuk menjadi dasar pondasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Jabatan Saat Ini

Peneliti

Pendidikan

1. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2. Master of Laws (Specialized in Criminal Justice and Criminology), University of New South Wales (UNSW)

Pengalaman Kerja

Mahkamah Agung

1. Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 265/KMA/SK/VIII/2022)
2. Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 238/KMA/SK/XI2021)
3. Anggota Kelompok Kerja Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Milik Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85/KMA/SK/V/2021)
4. Anggota Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/SK/IX/2018)
5. Anggota Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum, Modul, Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Mekanisme Pengawasan Hasil Penelitian (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/SK/IX/2017)

Kejaksanaan Agung

6. Anggota Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksanaan Agung Republik Indonesia (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2023)
7. Anggota Tim Persiapan Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Kejaksanaan terkait Mediasi Penal dan Diskresi Penuntut Umum (Surat Perintah Wakil Jaksa Agung Nomor Prin-08/B/WJA/02/2022)
8. Anggota Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksanaan Republik Indonesia (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Penelitian Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Penyusunan Modul, Kurikulum, dan Materi Ajar Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi
3. Penelitian Disparitas Putusan Pidana Korupsi di Indonesia
4. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi
5. Penelitian Pedoman Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksanaan Agung
6. Penyusunan Pedoman Jaksa Agung No. 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
7. Penelitian Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
8. Penelitian Indeksasi Putusan Hukuman Mati di Indonesia
9. Penelitian Eksekusi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan Hidup
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Milik Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
11. Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Publikasi

BUKU & BAGIAN BUKU (*BOOK CHAPTERS*)

1. *Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator*, (Jakarta: Yayasan TIFA, IJRS dan LBHM, 2022), tersedia pada <https://ijrs.or.id/faktor-faktor-penentu-hukuman-mati-di-indonesia-sebuah-indikator/>
2. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) tersedia pada <http://ijrs.or.id/peluang-dan-tantangan-penerapan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>
3. *Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Judicial Research Society, 2022) tersedia pada <https://ijrs.or.id/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia/>
4. *Kejahatan Konservasi sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional & Pemberantasannya Melalui Hukuman Finansial yang Efektif dan Efisien*, dalam Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Jakarta: The Indonesian Center for Environmental Law, 2019) tersedia pada <https://icel.or.id/buku/arah-baru-kebijakan-penegakan-hukum-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya/>
5. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017) tersedia pada <https://mappifhui.org/memaknai-dan-mengukur-disparitas-studi-terhadap-praktik-pemidanaan-pada-tindak-pidana-korupsi>
6. *Kriminalisasi “Trading in Influence” melalui Ketentuan Suap*, dalam Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI-FHUI, 2015)

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

1. “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, *Jurnal Integritas*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2019) (diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tersedia pada <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/384>
2. “Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Korupsi”, *Jurnal Prisma*, Vol. 37, No. 3 (2018) (diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial /LP3ES) tersedia pada https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=10452&keywords

3. "[Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does it Work Properly?](https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ajle-2017-0029/html)", *Asian Journal of Law and Economics*, Vol. 8, No.3, (Desember 2017) (diterbitkan oleh De Gruyter) tersedia pada <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ajle-2017-0029/html>
4. "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017 (diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) tersedia pada <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/140>

ARTIKEL OPINI (KORAN CETAK DAN MEDIA ONLINE)

1. "Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa?", (diterbitkan oleh The Conversation) tersedia pada <https://theconversation.com/pejabat-dengan-kekayaan-tak-wajar-tidak-bisa-dipidana-salah-siapa-174158> 6 Januari 2022
2. "Pemenuhan Hak Ekonomi-Sosial dan Pengurangan Kejahatan" (diterbitkan oleh Koran Tempo) tersedia pada <https://koran.tempo.co/read/opini/470209/papua-barat-hak-ekonomi-sosial-dan-pengurangan-kejahatan> 10 Desember 2021
3. "Pelapor Kasus Korupsi bisa Dapat Hadiah Hingga Rp200 Juta. Tapi Apakah Efektif?" (diterbitkan oleh The Conversation) tersedia pada <https://theconversation.com/pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-hadiah-hingga-rp200-juta-tapi-apakah-efektif-105726> 30 Oktober 2018
4. "Rancangan KUHP Rasa Kolonial" (diterbitkan oleh Koran Tempo) tersedia pada <https://kolom.tempo.co/read/1071270/rancangan-kuhp-rasa-kolonial> 20 Maret 2018
5. "KPK Can Name Setya Novanto a Suspect, Again", (Diterbitkan oleh Koran Jakarta Post) tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/10/04/kpk-can-name-setya-novanto-a-suspect-again.html> 4 Oktober 2017
6. "Desperately Fighting Corporate Crimes" (diterbitkan oleh Koran Jakarta Post) tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/27/desperately-fighting-corporate-crimes.html> 27 Maret 2017
7. "Suap Swasta, Dapatkah Dijerat?" (diterbitkan oleh Koran Tempo) tersedia pada <https://www.indonesiana.id/read/102762/suap-swasta-dapatkah-dijeratandreas-nathaniel-marbun> 14 Desember 2016
8. "Thank the Media for Exposing Judiciary's Flaws" (diterbitkan oleh Koran Jakarta Post) tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/news/2016/10/29/thank-media-exposing-judiciary-s-flaws.html> 29 Oktober 2016

9. "Imam Gusman Case: Criminalizing the Trade in Influence" (diterbitkan oleh Koran Jakarta Post) tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/09/21/irman-gusman-criminalizing-the-trade-in-influence.html> 21 September 2016
10. "Win-win Solution to Criminalize Drug Users", (diterbitkan oleh Koran Jakarta Post) tersedia pada <https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/25/win-win-solution-criminalize-drug-users.html> 25 Juni 2016